
Konstruksi Sosial Hubungan Tokoh Muslim-Kristen Pasca Konflik Horisontal di Kabupaten Poso

Social Construction of Muslim-Christian Relationships Post Horizontal Conflict in Poso Konflik District

Ari Fahry

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

(*Email Korespondensi: ari.fahry@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini ingin melihat bangunan hubungan sosial masyarakat Muslim-Kristen pasca konflik Horisontal di Kabupaten Poso. Rentan waktu 20 tahun pasca konflik, masyarakat Poso tentunya memiliki perspekti baru yang berbeda dari perspektif sebelumnya saat konflik belum lama selesai. Memahami apa yang terjadi dalam suasana kebatinan masyarakat yang terlibat konflik, tentu menjadi sangat penting sebagai acuan bagaimana rekonsiliasi bisa dicapai. Dalam terminology tersebut, dua masyarakat yang berkonflik membentuk realitas sendiri terhadap apa yang tengah dialami. Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah merupakan daerah yang pernah dilandak konflik Horizontal yang berkepanjangan. Perundingan demi perundingan ditempuh untuk menyelesaikan konflik dari dua komunitas agama yang berselisih. Perundingan terakhir perjanjian Malino pun belum menghentikan eskalasi konflik di daerah tersebut. Lahir kemudian program deradikalisasi sebagai upaya meredam tingkat radikalisme di Kabupaten Poso. Hasil penelitian ini menemukan, bahwa masyarakat bahwa tokoh-tokoh agama sebagai cerminan masyarakat Poso, telah membentuk realitas baru dalam memandang konflik Poso. Muslim dan Kristen sudah dapat kembali berbaur sebagaimana biasa. Realitas baru tersebut menginternalisasi menjadi fakta sosial yang di bangun di Kabupaten Poso.

Kata Kunci: Kontruksi Sosial, Hubungan, Konflik

Abstract

This study wants to see the building of social relations between the Muslim-Christian community after the Horizontal conflict in Poso Regency. Twenty years after the conflict, the Poso people certainly have a new perspective that is different from the previous perspective when the conflict was not over. Understanding what happens in the spiritual atmosphere of the people involved in the conflict, of course, becomes very important as a reference for how reconciliation can be achieved. In this terminology, two communities in conflict form their own reality of what is being experienced. Poso Regency in Central Sulawesi is an area that has been hit by a prolonged horizontal conflict. Negotiations after negotiations were pursued to resolve the conflicts of the two disputing religious communities. The latest negotiations on the Malino agreement have not stopped the escalation of conflict in the area. Then the deradicalization program was born as an effort to reduce the level of radicalism in Poso Regency. The results of this study found that the community that religious figures as a reflection of the Poso community had formed a new reality in viewing the Poso conflict. Muslims and Christians have been able to mingle again as usual. This new reality is internalized into a social fact that was built in Poso Regency.

Keywords: Social Construction, Relationship, Conflict

PENDAHULUAN

Kabupaten Poso merupakan daerah di Sulawesi Tengah di mana pernah terjadi konflik horisontal yang cukup panjang dan berjilid-jilid. Pasca konflik, pemulihan situasi Poso juga tidak sesederhana mempertemukan dua kubu yang berbeda kemudian bersepakat damai lewat butir-butir kesepakatan.

Perundingan Malino yang mempertemukan tokoh-tokoh dari kelompok Muslim dan Kristen merupakan penanda betapa strategis peranan tokoh-tokoh agama dalam menciptakan keamanan di wilayah ini. Sikap tokoh merupakan representasi dari sikap masyarakat umum, di mana tokoh-tokoh agama memiliki peranan strategis sebagai opinion leader di masyarakat (1).

Pasca perundingan damai atau yang dikenal dengan perjanjian Malino, situasi Poso belum benar-benar pulih. Aksi-aksi kekerasan masih saja terjadi di daerah bekas konflik ini. Bom Tentena, Bom depan Polres Poso, hingga belakangan munculnya gerakan perlawanan yang dipimpin Santoso cs semakin menambah muram wajah kabupaten yang memiliki moto Sintuwu Maroso (bersatu kita kuat) ini.

Tentang bagaimana konflik terus tumbuh dan hadir Yunus (2014: 227) dalam kesimpulannya mengatakan, Salah satu penyebab lahirnya konflik disebabkan oleh stereotype satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama. Beberapa kasus yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama telah terjadi dimana-mana di muka bumi ini. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak umat agama lain memberikan stereotype kepada umat Islam sebagai umat yang radikal, tidak toleran, teroris, fundamentalis dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan manusia (2).

Kegagalan menangani konflik juga menjadi alasan langgengnya konflik di tengah-tengah masyarakat. Kegagalan rekonsiliasi masyarakat pasca konflik komunal oleh karena proses rekonsiliasi belum sepenuhnya menyentuh akar konflik sehingga yang kemudian diperparah oleh terjadinya krisis kepercayaan (distrust) antar masyarakat yang akhirnya menimbulkan segregasi sosial. Kegagalan rekonsiliasi ini hanya dapat dilakukan dengan dibangunnya kembali proses perdamaian berjangka panjang yang berbasis kepercayaan (trust). Dalam upaya merajut kembali perdamaian (rekonsiliasi) masyarakat pasca konflik berbasis trust, terdapat empat indikator yang mesti dilaksanakan, yakni menumbuhkan keinginan tiap warga untuk berasosiasi, membudayakan kerjasama antar kelompok masyarakat, membudayakan kejujuran dan menanamkan sikap loyalitas sebagai bentuk pengabdian tiap orang pada kepentingan masyarakat. Mekanisme rekonsiliasi masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga non-pemerintah sebaiknya dilakukan secara terus-menerus dan bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai rekonsiliator konflik (3).

Pasca konflik horizontal yang meninggalkan “luka” pada masing-masing kelompok masyarakat. Masyarakat Poso berupaya kembali merajut kehidupan sosial di tengah banyaknya peristiwa serta gangguan yang juga dapat berpotensi mengganggu keharmonisan situasi sosial yang ada di daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (4). Secara konvensional metodologi kualitatif cenderung diasosiasikan dengan keinginan peneliti untuk menelaah makna, konteks, dan suatu pendekatan holistik terhadap fenomena (5). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, tradisi penelitian kualitatif meliputi beberapa metodologi diantaranya: Biografi, Fenomenologi, Grounded Theory Study, Etnografi, dan Studi Kasus. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Studi Kasus untuk mengungkap pertanyaan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Sosial

Terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif (6). Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi (7). Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru sedangkan realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta (8).

Realitas objektif hadir dari proses eksternalisasi individu-individu yang secara kolektif berinteraksi dan memunculkan objektifitas baru yang juga disebut sebagai fakta sosial. Sementara subjektifitas masing-masing individu dalam memandang realitas terbentuk dari pengetahuan, pengalaman, serta konstruksi definisi terhadap realitas.

Institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi (9).

Konflik Horisontal

Konflik horizontal ialah konflik antar masyarakat yang bersifat masal (komunal) (10). Di Indonesia dengan penduduk yang beranekaragam, konflik-konflik horizontal rentan terjadi. Konflik semacam itu pernah terjadi di Ambon, Kalimantan, juga Poso.

Konflik Horizontal merupakan konflik yang berlangsung di antara (kelompok) masyarakat, yang dapat saja dipicu atau bermula dari masalah individu anggotanya, yang kemudian meluas menjadi konflik massal (11).

Biasanya, konflik horizontal, konflik primordial, dan konflik sektarian dikatakan pula sebagai konflik sosial dan komunal. Hal ini karena konflik ini, melibatkan banyak orang atau bersifat masif (massal), dan berkepanjangan yang menciptakan situasi anarki total akibat kerusuhan (riots) yang meluas. Konflik tersebut tidak berupa tawuran massal biasa yang sifatnya insidental dan kebetulan (11).

Dalam konteks konflik horizontal, paling tidak tiga persoalan yang dinilai sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Ketiganya menyangkut konflik agama, antar suku, antar wilayah. Diantara ketiga macam konflik horizontal, konflik antar pemeluk agama yang dinilai paling parah. Konflik agama yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia hingga saat ini menegaskan kuatnya identitas agama dan diartikulasikan sebagai simbol penegasan terhadap kelompok lawan. Kekerasan yang ditimbulkan oleh menguatnya diskriminasi antar pemeluk agama.

Konflik Poso

Dalam konflik Poso, konflik antaragama adalah wacana yang paling dominan. Wacana ini membentuk dan mengkonstruksikan peristiwa-peristiwa kekerasan di Poso dan sekitarnya ke dalam narasi-narasi mengenai dua komunitas agama, Islam dan Kristen secara berhadapan-hadapan. Bentuk produksi, re-produksi wacana konflik Poso sebagai konflik antar agama antara lain dengan selalu dihubungkannya sebagai peristiwa kekerasan dengan komunitas agama,

Kristen dan Islam. Indikasi menghubungkan peristiwa kekerasan dengan dua agama tersebut terlihat pada betapa seringnya pemerintah, media massa termasuk Organisasi Non Pemerintah (Ornop) lokal maupun internasional serta berbagai pihak mengidentifikasi korban dan atau pelaku penembakan, bom, mutilasi, bahkan wilayah/tempat tinggal yang dibakar, dirusak, dengan agama yang dianut korban. Kebiasaan mengidentifikasi peristiwa kekerasan berdasarkan agama yang dianut korban kemudian menjadi sesuatu yang biasa diikuti masyarakat Poso maupun luar Poso.

Wacana konflik Poso sebagai konflik antar agama muncul sejak awal dan menjadi salah satu penyebab utama meluasnya konflik Poso. Wacana kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi memperkuat wacana konflik Poso sebagai konflik agama dengan menggunakan kategori agama dan suku yang mayoritas ada di kabupaten Poso. Sementara itu bergulirnya wacana terorisme tidak saja berhasil menggeser bahkan menenggelamkan wacana-wacana lainnya, tetapi juga memelihara wacana dominan yakni konflik poso sebagai konflik antar agama, meskipun penyebutan terorisme hanya pada kelompok agama tertentu. Ini menunjukkan bahwa konflik kekerasan yang masih berlangsung di Poso berkaitan dengan sentiment keagamaan. Dengan kata lain wacana terorisme adalah wajah baru yang lebih global dari wacana konflik Poso sebagai konflik antar agama.

Konflik Poso terbagi dalam empat fase yang saling tumpang tindih dan memiliki bentuk kekerasan yang berbeda-beda. Fase pertama terdiri dari dua kerusuhan Kota pada Desember 1998 dan April 2000, yang keduanya memiliki tautan jelas dengan persaingan di antara jaringan-jaringan patronase politik lokal. Tidak ada korban jiwa dalam kerusuhan pertama, dan dalam kerusuhan kedua April 2000, tujuh orang meninggal dunia, separuh diantaranya karena ditembak Polisi. Sebulan setelah kerusuhan kedua, eskalasi kekerasan berlangsung sedemikian cepat hingga konflik memasuki fase baru (ketiga) pembunuhan yang menyebar luas. Sedikitnya 246 orang, kebanyakan Muslim, tewas terbunuh saat suatu sub-kelompok Komunitas Kristen melancarkan serangan kepada warga Muslim. Fase selanjutnya (keempat) menyusul pasca pembunuhan Mei-Juni 2000, yakni fase konflik berkepanjangan dari kedua kubu yang berlangsung selama 18 bulan.

Konflik Poso pada awalnya sangat terkait dengan kompetisi elite lokal. Saat konflik Poso meletus pertama kalinya akhir Desember 1998, saat itu berakhir masa tugas Bupati Arief Patanga. Perebutan kursi kepala daerah terjadi antara Sekwilda Yahya Patiro dengan Damsyik Ladjalani, keduanya adalah tokoh Golkar. Akan tetapi, Damsyik yang didukung PPP dan tokoh muslim dan Yahya Patiro didukung PDIP dan tokoh-tokoh Kristen. Keduanya gagal menjadi yang dipilih anggota DPRD hasil pemilu 1999. Konflik memanas lagi saat sekwilda baru mau ditunjuk, seorang tokoh PPP mengancam akan ada kerusuhan, apabila Damsyik tidak ditunjuk sebagai sekwilda. Sebaliknya tokoh-tokoh Kristen menuntut sekwilda dari kalangan mereka sebagai bagian dari power sharing.

Pemicu konflik Poso, bahwa dari gambaran tersebut dapat diketahui, salah satu penyebab utama terjadi konflik Poso, karena persaingan antara elite politik lokal, dipicu oleh tawuran antarwarga yang berbeda agama, entah mengapa kemudian merebak menjadi kerusuhan antar pemeluk agama.

Dari pergeseran konflik yang berawal dari konflik antarwarga beralih menjadi konflik agama, tampak jelas sekali betapa peristiwa konflik juga mengalami proses pergeseran makna dari masalah konflik criminal murni ke konflik antar umat beragama. Situasi Poso yang hadir belakangan tidak lepas dari sejumlah peristiwa yang pernah melatarbelakangi kondisi daerah ini. (Dien Albanna: 50) mengungkapkan konflik Poso terjadi pada tiga gelombang kerusuhan. Kerusuhan Poso I 25-29 Desember 1998, kerusuhan Poso II, 17-21 April 2000, dan kerusuhan Poso III, 16 Mei-15 Juni 2000. Atas serangkaian peristiwa dengan nuansa konflik SARA, pada tanggal 20 Desember 2001 para pemuka agama di Poso mencetuskan Deklarasi Malino.

Setelah disepakatinya deklarasi (perjanjian) damai Malino, situasi Poso belum benar-benar kondusif. Gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Poso masih saja kerap terjadi. Beberapa tahun setelah deklarasi Malino, kedamaian pun bisa terwujud di Bumi Sintuwu Maroso. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Deklarasi Malino kembali terusik setelah terjadinya bentrok vertikal antara aparat dan kelompok sipil bersenjata yang digembongi oleh Santoso.

Maka bila kita coba mengurai sejarah konflik Poso, kurang lebih kita akan menemukan skema konflik Poso sebagai berikut; Konflik Elit Politik Daerah – Tawuran antar warga beda agama – Konflik antar ummat beragama (Muslim – Kristen) – Konflik Vertikal (Sipil bersenjata – Kepolisian).

Pasca konflik Horizontal di Kabupaten Poso, masyarakat Poso melalui tokoh-tokohnya dari kedua kelpompok masyarakat yang berkonflik memulai usaha untuk menatap kehidupan baru pasca konflik. Meski gangguan demi gangguan terhadap usaha menjalin kerukunan antar Muslim-Kristen kerap kali ada. Seiring berjalan, peta konflik Poso memang mengalami pergeseran dari konflik sesama sipil menjadi konflik sipil dan aparat negara.

Muslim-Kristen di Daerah bekas konflik tersebut sudah kembali berbaur sebagaimana dulu. Hal itu tercermin dari apa yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh agama di Kabupaten Poso. Hj. Adnan Arsal misalnya, tokoh sentral di kubu ummat Islam ini mengatakan : “Kita sama-sama menjaga Poso. Apakah itu aparat, apakah itu ummat beragama, tokoh-tokoh agama. Dan masyarakat pada umumnya, menjaga jangan sampai konflik ini berulang kembali. Kemarin itu kita melakukan tabligh akbar mendatangkan Imam masjid istiqlal, sampai kurang lebih 10rb orang yang hadir, itu untuk merangkul semua. Baik Islam maupun Kristen untuk bersatu sama-sama membawa anak bangsa ini menuju kedamaian sesuai dengan agama yang kita yakini. Sehingga itulah yang kita kehendaki, jangan lagi ada kekerasan-kekerasan yang berkesinambungan” (Wawancara 29 Juni 2018).

Hj Adnan Arsal yang juga merupakan pimpinan Forum Silaturahmi dan Perjuangan Ummat Islam (FSPUI) Poso ini juga kerap terlihat hadir dalam acara-acara yang melibatkan tokoh-tokoh lintas agama. Dalam beberapa kesempatan Hj Adnan lebih banyak membawa isu menjaga daerahnya dari peredaran Narkoba dan minuman keras.

“Saya kemarin dengan Kapolres bicara, Poso ini jangan dibawa pada acara-acara hura-hura mendatangkan artis dianggap Poso itu sudah aman, sudah damai, apalah arti semua itu, kalau masyarakat Poso tidak memahami agamanya. Saya harapkan, di Poso itu dibentuk majelis-majelis taklim yang ada di desa-desa, kenapa karena Polisi sendiri kewalahan menghadapi Narkoba, kewalahan menghadapi minuman keras, kewalahan menghadapi perjudian. Bukan apa pak, kami di Poso ini, berapa anak-anak yang peminum waktu itu, tapi karena ikut taklim berubah mentalnya karena ikut taklim. Orang peminum berubah jadi orang yang rajin ibadah. Kenapa dia berubah, karena hari-hari dia dapat siraman rohani keagamaan dan kerohanian. Disaat mereka mendapat pendidikan seperti itu, berubah dia punya mental. Oleh karena itu, bentuk majelis taklim dimana-mana dan kapolres mendukung. Semua desa-desa yang add muslim disitu, bentuk majelis taklim di masjid-mesjid dan kelompok-kelompok untuk mendapatkan ilmu siraman keagamaan” (Wawancara 29 Juni 2018).

Sementara itu, dari pihak Kristen Jemmy Metusala, mantan kombatan Nasrani yang juga sekretaris Crisis Center GKST memaparkan pengalamannya pasca konflik serta hubungan dengan masyarakat muslim di Poso.

Saya merasakan betul itu bagaimana suasana agama yang baik. Itulah saya katakan, kita itu tidak punya landasan ideologi yang kuat untuk berperang atas nama agama sehingga bisa cepat cair. Di teman-teman Islam juga begitu, di kita Kristen juga begitu. Saya dengan ateng itu mencoba membuat contoh kepada kawan-kawan, Ateng biasa tidur di Tentena, ketika pulang di bilang ke teman-temannya di Tokorondo, ini saya te dibikin apa-apa dang. Begitu juga saya, teman-teman di tentena bilang ee...so Mati ini bang jem, saya pulang saya bilang ini dan saya sehat-sehat.

Saya dengan ateng coba buktikan, tidak butul itu mereka bilang itu. Ini buktinya torang sehat-sehat. Sehingga kemudian kerja-kerja itu yang torang lakukan, kase main bola anak-anak Tokorondo bawa di Sojo main bola, anak-anak tentena torang bawa turun main bola. Torang tidak bercerita perdamaian, tapi bercerita teman, ada yang punya teman satu sekolah kase baku dapa, itu saja. Kesadaran itu kemudian muncul pelan-pelan sama dorang, ooo betul ini, kalau torang tidak buka diri baku curiga terus” (Wawancara 29 Juni 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan perjalanan panjang dari upaya melepaskan stigma diantara sesama kelompok masyarakat yang berkonflik baik Muslim maupun Kristen. Perjalanan itu pada akhirnya memberikan perspektif baru dari kedua bela pihak. Kedua kelompok lelah bertikai, dan seiring semakin terbukanya kanal-kanal dialog, Muslim-Kristen memberikan kontruksi baru terhadap golongan lain dari mereka. Asimilasi masyarakat Muslim-Kristen di Kabupaten Poso telah mengkonstruksi relaitas baru yang juga menjadi fakta sosial di masyarakat hari ini. Fakta sosial itu kemudian menginternalisasi dalam masyarakat yang membentuk pandangan subjektif masyarakat tentang suasana Poso pasca konflik Horisontal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Siagian HF. Partisipasi dan efek komunikasi pemuka pendapat dalam pembangunan. *J Dakwah Tabligh*. 2013;14(1):53–73.
2. Yunus NSNM, Rashid WEW, Ariffin NM, Rashid NM. Muslim's purchase intention towards non-Muslim's Halal packaged food manufacturer. *Procedia-Social Behav Sci*. 2014;130:145–54.
3. Anwar S. Membangun kembali perdamaian: Rekonsiliasi konflik komunal berbasis trust. *PERENNIAL*. 2015;133–42.
4. Semiawan CR. Metode penelitian kualitatif. Grasindo; 2010.
5. INDRA CAHYONO B. Tragedi Kemanusiaan Dalam Foto Jurnalistik (Analisis Semiotik Representasi Tragedi Kemanusiaan Dalam Foto Jurnalistik Agresi Militer Izrael di Jalur Gaza pada Surat Kabar Harian Republika Edisi 17 November 2012 sampai 24 November 2012). Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2015.
6. Ngangi CR. Konstruksi sosial dalam realitas sosial. *Agri-Sosioekonomi*. 2011;7(2):1–4.
7. Santoso P. Konstruksi sosial media massa. *AL-BALAGH J Komun Islam*. 2016;1(1).
8. Bina MAH. Fenomena Hate Speech Di Media Sosial dan Konstruksi Sosial Masyarakat. *J Peurawi Media Kaji Komun Islam*. 2021;4(1):92–100.
9. Bungin B. Komunikasi Politik Pencitraan. *The Social Construction of Public Administration (SCoPA)*. Prenada Media; 2018.
10. Suherman A, Sirajuddin A. Kearifan Lokal Sebagai Basis Komunikasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Dan Komunal. *Dialekt J Ekon dan Ilmu Sos*. 2018;3(2):34–42.
11. Nainggolan PP. MeNgaPa KoNfliK BerulaNg Terjadi di KoTa aMBoN? TiNjauaN deMografi daN KeaMaNaN aTas KoNfliK HorizoNTal PerKoTaaN. *J Polit Din Masal Polit Dalam Negeri dan Hub Int*. 2016;3(2).